



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan indikator berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka Peraturan Walikota tersebut perlu di ubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **26** Maret 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal **26** Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR ..16

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG

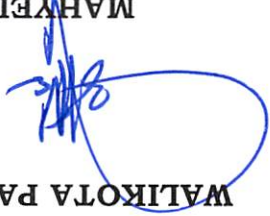
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab
1	1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkat prestasi se-Sumatera Barat (SD) Peningkat prestasi se-Sumatera Barat (SMP)	Peningkat prestasi SD se – Sumatera Barat pada tahun n Peningkat prestasi SMP se – Sumatera Barat pada tahun n	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
2.	Berkembangnya usaha perdagangan dan industri	Persentase kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian	Nilai sektor perdagangan dan perindustrian terhadap PDRB pada tahun n	Dinas Perdagangan
3.	Berkembangnya Kota Padang sebagai kota tujuan wisata	Persentase PDRB pariwisata	$\frac{\text{jumlah kontribusi sektor pariwisata}}{\text{jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan per kapita (Rp. Juta)	$\frac{\text{Pendapatan tahun n}}{\text{jumlah penduduk Kota Padang tahun n}} \times 100\%$	Bappeda

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	5
1	2	3	4	5
5.	Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha	Angka pengangguran terbuka	$\frac{\text{jumlah pengangguran terbuka}}{\text{jumlah keseluruhan pengangguran}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
7.	Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat	Gini rasio	Alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk	Bappeda
8.	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	$\frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah keseluruhan penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Sosial
9.	Meningkatnya produksi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian	Nilai sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun n	Dinas Pertanian
10.	Terwujudnya tata kelola Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan yang berkualitas	Persentase penurunan titik genangan air	$\frac{\text{jumlah titik genangan air pada tahun } n - \text{jumlah titik genangan air pada tahun } n - 1}{\text{jumlah titik genangan air pada tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11.	Terciptanya peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tereduksi	$\frac{\text{jumlah volume sampah (ton) yang terangkut pada tahun } n}{\text{jumlah volume sampah (ton) pada tahun } n} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	2	3	4
12.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	$\frac{\text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - \text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - 1}{\text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - 1} \times 100\%$
13.	Terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang kota	Persentase kesesuaian bangunan dengan RTRW	$\frac{\text{jumlah bangunan yang sesuai dengan RTRW}}{\text{jumlah total bangunan}} \times 100\%$
14	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks ketahanan daerah pada tahun n
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun n
16.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Nilai LAKIP pada tahun n Opini BPK pada tahun n
			Inspektorat
			Sekretariat Daerah
			Dinas Lingkungan Hidup
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Dinas Perhubungan
			5
			SKPD Penanggung Jawab

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
17.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah
18.	Terwujudnya budaya integritas	Zona integritas (OPD)	Zona integritas (OPD) pada tahun n	Inspektorat

AF

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI